

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA CEPOKOREJO, KECAMATAN PALANG, KABUPATEN TUBAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Salah satu dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban. Letak Kabupaten Tuban bisa dikatakan strategis yang mana berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur serta Jawa Tengah, dan dilewati oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara. Luas wilayah Kabupaten Tuban mencapai 1839,94 km². Menurut data administratif, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan dan 328 Desa/Kalurahan². Batas wilayah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Di bagian utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
3. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Di bagian barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Rembang dan Blora.

Batas wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta Provinsi Jawa Timur pada Gambar 2.1.

² Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023. Retrieved 22 Februari 2024 from <https://tubankab.go.id/files/Transparansi%20Anggaran/Tahun%202023/perbup-rkpd-2023-kab-tuban.pdf>

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Tuban



Sumber: RTRW Kab. Tuban Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Tuban dapat dibagi menjadi empat kawasan yang berbeda, berdasarkan karakteristiknya. Di bagian utara, terdapat wilayah pantai yang dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Kawasan pegunungan kapur mendominasi bagian tengah Kabupaten Tuban, yang kaya akan bahan tambang galian. Pegunungan ini tersebar mulai dari Kecamatan Jatirogo hingga Kecamatan Widang, serta dari Kecamatan Merakurak hingga Kecamatan Soko. Bagian selatan Kabupaten Tuban memiliki tanah yang sangat subur, menjadikannya daerah yang ideal untuk pertanian, khususnya sebagai penghasil padi terbaik di wilayah tersebut. Sementara itu, bagian tenggara Kabupaten Tuban adalah daerah aliran Sungai Bengawan Solo, yang melintasi Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang.

Kabupaten Tuban memiliki potensi ekonomi yang bermacam sumbernya, beberapa potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban yaitu, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, pariwisata, hasil tambang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dsb. Kabupaten Tuban memiliki sektor

unggulan di bidang pertanian, terutama dalam produksi tanaman pangan. Di antara berbagai komoditas pertanian, padi menjadi yang paling dominan, meskipun jagung, kacang tanah, dan ubi kayu juga menjadi komoditas penting. Selain sektor pertanian tanaman pangan, terdapat potensi pengembangan lainnya seperti pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi, pariwisata serta pelabuhan laut yang juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pada tahun 2021, Kabupaten Tuban memiliki total populasi 1.203.127 jiwa. Terdiri dari 600.785 penduduk laki-laki dan 602.342 penduduk perempuan, jumlah ini menunjukkan keseimbangan gender yang cukup merata. Keberadaan penduduk sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pemerintahan, karena mereka tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam proses tersebut. Sebaran kepadatan penduduk di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban bervariasi. Kecamatan Tuban mencatat kepadatan tertinggi dengan 4.320 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Kenduruan memiliki kepadatan terendah, yaitu 360 jiwa per kilometer persegi.

Pendidikan merupakan sebuah investasi yang berharga dalam pembangunan suatu negara atau masyarakat. Bukan hanya investasi dalam individu, tetapi juga pondasi dari perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang hasilnya dapat dinikmati kemudian hari. Sebagaimana pembangunan dibidang

pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling utama selain bidang kesehatan dan ekonomi (Susanto & Pangesti, 2019). Oleh karena itu, tabel di bawah menjelaskan pendidikan penduduk menurut rata rata lama sekolah di Kabupaten Tuban tahun 2018-2021.

Tabel 2. 1 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tuban tahun 2017-2021

NO	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
1	2018	6,52
2	2019	6,48
3	2020	6,81
4	2021	7,18

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2022

Rata-rata sekolah penduduk Kabupaten Tuban tahun 2017 sebesar 6,52 tahun, pada tahun 2018 meningkat sebesar 6,48 tahun, kemudian pada tahun 2019 dan di tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tuban sebesar 6,81 dan 6,95 tahun, pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,18 tahun yang artinya rata-rata penduduk yang bersekolah di Kabupaten Tuban hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang SMP. Pendidikan memiliki pengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pengukuran kemajuan suatu wilayah, berikut akan diuraikan beberapa indikator umum dalam mengukur kesejahteraan masyarakat:

a. Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban telah mengalami fluktuasi selama periode 2016-2021. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan

melihat PDRB Kabupaten Tuban, kita dapat memahami ukuran ekonomi di wilayah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitasnya mencerminkan kondisi ekonomi di Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan serta memperbaiki distribusi pendapatan.

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB di Tuban kembali meningkat sebesar 3%. Sebelumnya, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Tuban, Jawa Timur, dan secara nasional mengalami penurunan. Penurunan PDRB di Tuban mencapai 5,85%. Sektor-sektor yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 meliputi sektor jasa lainnya yang turun sebesar 13,99%, sektor industri pengolahan turun sebesar 11,44%, sektor perdagangan besar dan eceran turun sebesar 9,69%, dan sektor akomodasi serta makanan minuman yang mengalami penurunan menjadi 9,34%.

b. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data statistik yang mencakup pertumbuhan dan tingkat pendapatan masyarakat, merangkum dampak keseluruhan dari kegiatan ekonomi berupa perolehan nilai tambah selama periode tertentu di suatu wilayah. Selain itu, PDRB berfungsi sebagai alat evaluasi hasil pembangunan ekonomi di sektor nasional maupun regional, melibatkan pemerintah pusat atau daerah, serta pihak swasta (Statistika, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengacu pada nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

mencerminkan nilai PDRB per individu penduduk. Data PDRB per Kapita Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan perkembangan lapangan usaha dan penambahan jumlah penduduk. Pada periode 2016-2019, PDRB per kapita Kabupaten Tuban mengalami peningkatan, mencapai Rp 55,04 juta pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami penurunan menjadi Rp 52,95 juta, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

c. Persentase Penduduk Kemiskinan

Pada tahun 2020, sebanyak 187.130 orang atau 15,91% dari penduduk Kabupaten Tuban hidup di bawah garis kemiskinan (GK), yang mengalami peningkatan sebesar 1,33% atau sekitar 16.330 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 170.800 orang atau 14,58%. Pada tahun 2021, persentase ini kembali naik menjadi 16,31%. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur dan membagi penduduk menjadi kelompok miskin dan non-miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin merupakan proporsi penduduk yang berada di bawah GK. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban cukup menonjol, menempatkannya di peringkat lima terbawah.

Keberhasilan pembangunan sering kali ditandai oleh penurunan berbagai indikator kemiskinan, yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa kenaikan garis kemiskinan setiap tahun mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. Selama 2022-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban meningkat dari Rp 421.287 menjadi Rp

454.336 per kapita per bulan, yang berarti peningkatan sebesar 7,84 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2023, garis kemiskinan di Tuban masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur, di mana garis kemiskinan mencapai Rp 507.286 per kapita per bulan.

Kenaikan garis kemiskinan adalah fenomena alami yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan harga pangan, situasi ekonomi nasional, dan kondisi ekonomi global. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023.

2.2 Desa Cepokorejo

Desa Cepokorejo memiliki luas wilayah 256 Ha dimana pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk 4918 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2457 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2461 jiwa. Penduduk Desa Cepokorejo sebagian besar adalah petani. Berikut batas-batas wilayah Desa Cepokorejo:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Leranwetan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wangun
3. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Ketambul
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Leranwetan

Desa Cepokorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Desa Cepokorejo dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Yaskur yang menjabat pada periode 2019-2025. Desa Cepokorejo memiliki

4 (empat) dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Caper, Dusun Waru dan Dusun Randugeneng. Disetiap dusun dipimpin oleh kepala wilayah masing-masing yang disebut Kepala Dusun (Kadus) atau sering dikenal dengan sebutan Kamituwo.

Kondisi ekonomi di Desa Cepokorejo, Kabupaten Tuban, dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup berbagai aspek, termasuk pertanian, industri, perdagangan, serta infrastruktur dan sumber daya manusia.

2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebuah program bantuan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendukung keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui penggunaan akun elektronik yang disediakan oleh bank. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima KPM dapat digunakan secara efektif dan terarah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Melalui BPNT, KPM hanya dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan atau e-warong yang telah bekerja sama dengan bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan dengan tepat sasaran, yaitu untuk memperoleh makanan yang diperlukan oleh KPM dan keluarganya. Dengan memanfaatkan sistem non-tunai, program BPNT juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan pangan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat. Selain itu, penggunaan akun elektronik memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih mudah dan aman bagi KPM, meminimalkan risiko kehilangan atau pencurian bantuan. Dengan demikian, BPNT tidak hanya bertujuan untuk memberikan

bantuan pangan kepada KPM, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan efisien dan efektif guna mendukung kebutuhan pangan mereka secara tepat waktu dan terarah.

Program BPNT dirancang dengan tujuan utama untuk mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dengan menyediakan sebagian dari kebutuhan pangan mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi yang diterima oleh KPM, memperbaiki keakuratan dan efisiensi dalam penyaluran bantuan pangan kepada mereka, serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, salah satu fokus utama dari program BPNT adalah memastikan bahwa keluarga penerima manfaat dapat mengakses makanan dengan lebih mudah dan aman, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya finansial mereka ke bidang lain yang juga penting. Dengan memberikan bantuan pangan secara teratur, program ini juga berkontribusi pada peningkatan keamanan pangan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, tidak hanya itu, BPNT juga bertujuan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, membantu mereka mempertahankan kesehatan yang baik dan meningkatkan produktivitas. Dengan memperluas pilihan makanan yang tersedia, program ini memberikan kesempatan bagi KPM untuk mengembangkan pola makan yang lebih beragam dan sehat sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga mereka, selain manfaat langsung bagi KPM, program BPNT juga berupaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan demikian,

program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada KPM, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bantuan sosial pangan non-tunai disalurkan dengan mentransfer uang sejumlah Rp 110.000,- per bulan kepada penerima program melalui sebuah kartu. Kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja barang-barang sembako seperti beras dan telur di e-Warung KUBE. e-Warung KUBE adalah singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama, yang merupakan warung penjual sembako atau bahan pangan yang menjalin kerja sama dengan Bank Himbara.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang termasuk dalam program jaminan sosial. Bantuan sosial merujuk pada jenis program yang memberikan tunjangan uang, barang, atau layanan kesejahteraan kepada populasi yang paling rentan, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini umumnya diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan penilaian kemiskinan tanpa mempertimbangkan kontribusi sebelumnya seperti pembayaran pajak atau premi asuransi. Kelompok sasaran bantuan sosial meliputi keluarga miskin, penganggur, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik atau mental, kaum minoritas, yatim piatu, orang tua tunggal, pengungsi, serta korban bencana alam atau konflik sosial. Beberapa tujuan utama perlindungan sosial antara lain; Mencegah dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh individu sehingga mereka tidak mengalami penderitaan yang parah dan

berlangsung lama; Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan untuk menghadapi dan keluar dari situasi kemiskinan, penderitaan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi; dan Menyediakan kelompok-kelompok miskin dengan standar hidup yang layak, sehingga siklus kemiskinan tidak terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Evaluasi keberhasilan manajemen program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat dilakukan dengan mengukur beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tepat sasaran penerima manfaat: Program BPNT hanya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai keluarga kurang mampu atau miskin, yang kemudian didata dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Tepat jumlah: Jumlah saldo yang diberikan kepada penerima manfaat adalah sebesar Rp10.000,00 per bulan melalui kartu elektronik.
3. Tepat waktu: Penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Tepat harga: Harga bahan pangan yang dibeli menggunakan BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Tepat kualitas: Produk pangan yang dibeli memenuhi persyaratan kualitas, seperti beras dengan standar kualitas Medium.
6. Tepat administrasi: Semua persyaratan administrasi terpenuhi dengan benar, lengkap, dan tepat waktu.

Untuk mencapai efektivitas dalam penyaluran BPNT, perlu adanya pengaturan mekanisme pelaksanaan program dengan baik, sebagaimana diatur

dalam Pedoman Umum "Raskin" (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2012.